

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan data pemantauan harga kebutuhan pokok Triwulan I 2026 dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terlihat pola perkembangan harga sebagai berikut:

1. Perkembangan Harga Komoditas Utama

- a. Kelompok relatif stabil

Beberapa komoditas menunjukkan stabilitas harga yang cukup baik sepanjang Januari-Maret:

- Beras (medium & premium, termasuk SPHP): cenderung tetap (tidak mengalami perubahan signifikan).
- Gula pasir (curah & kemasan): stabil di kisaran yang sama.
- Minyak goreng (curah & kemasan premium): relatif tidak berubah
- Tepung terigu: stabil.

Hal ini menunjukkan pasokan cukup dan distribusi lancar pada komoditas strategis utama.

- b. Kelompok berfluktuasi

Komoditas hortikultura mengalami fluktuasi cukup tajam, terutama:

- Cabai merah keriting: turun di awal, lalu meningkat kembali di akhir periode.
- Cabai rawit merah: fluktuasi sangat tinggi, bahkan mengalami kenaikan tajam di akhir periode.
- Cabai rawit hijau: relatif stabil di awal, mulai naik di akhir.
- Bawang merah: tren menurun bertahap.
- Bawang putih: relatif stabil, sedikit fluktuasi.

Bawang bombai: cenderung stabil setelah penurunan awal.

Ini mencerminkan karakter komoditas hortikultura yang sensitif terhadap pasokan dan cuaca.

c. Komoditas dengan indikasi kenaikan

- Cabai rawit merah: menunjukkan lonjakan signifikan (indikasi tekanan inflasi).
- Cabai merah besar/keriting: mulai meningkat menjelang akhir periode.

Menjadi penyumbang utama risiko inflasi pangan.

2. Kondisi Umum Pasokan

Ketersediaan stok:

- Sebagian besar komoditas dalam kondisi “banyak” / cukup.

Artinya, secara umum tidak ada gangguan besar pada sisi stok, namun fluktuasi harga lebih dipengaruhi faktor distribusi dan produksi.

3. Analisis Risiko ke Depan

a. Risiko kenaikan harga (upside risk)

1. Komoditas cabai

- Sangat rentan terhadap:
 - Cuaca ekstrem
 - Gangguan panen
- Potensi lonjakan harga masih tinggi.

2. Distribusi wilayah kepulauan

- ▪ Biaya logistik tinggi → berpotensi mendorong disparitas harga.

3. Momentum hari besar keagamaan

- Permintaan meningkat → tekanan harga (terutama cabai, bawang, minyak goreng).

b. Risiko stabilitas

1. Pasokan beras dan gula relatif aman

- Jika intervensi pemerintah (SPHP, operasi pasar) terus berjalan, harga tetap terkendali.

2. Kebijakan harga (HET Minyakita)

- Jika pengawasan diperketat → harga bisa kembali stabil.

c. Risiko struktural

- Ketergantungan pada pasokan luar daerah (khusus hortikultura)
- Rantai distribusi panjang
- Minimnya cold storage / pengendalian pascapanen

4. Kesimpulan:

- Harga relatif stabil pada komoditas pokok utama (beras, gula, minyak, tepung).
- Fluktuasi signifikan terjadi pada komoditas hortikultura, terutama cabai.
- Risiko inflasi ke depan didominasi oleh cabai dan distribusi wilayah kepulauan.
- Kondisi stok aman, namun belum sepenuhnya menjamin stabilitas harga tanpa intervensi.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2.

Permasalahan pengendalian inflasi:

1. Tingginya Volatilitas Harga Komoditas Pangan Strategis

Fluktuasi harga yang signifikan, khususnya pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang, menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan daerah masih rentan terhadap gangguan pasokan, perubahan musim, dan faktor cuaca.

2. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis masih bergantung pada daerah pemasok, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga antar wilayah.

3. Belum Optimalnya Sistem Distribusi, Khususnya Wilayah Kepulauan

Kondisi geografis kepulauan menyebabkan tingginya biaya logistik dan terbatasnya akses distribusi, yang berdampak pada disparitas harga antar wilayah.

4. Belum Efektifnya Infrastruktur dan Kelembagaan Distribusi Pangan

Fasilitas pendukung distribusi seperti Mini Distribution Center (MDC) belum berfungsi optimal dalam menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga.

5. Intervensi Pengendalian Harga yang Belum Konsisten dan Merata

Pelaksanaan program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah dan belum dilakukan secara berkelanjutan.

6. Lemahnya Pengawasan terhadap Kepatuhan Harga Acuan Pemerintah

Masih ditemukan harga komoditas tertentu (misalnya minyak goreng) yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), mencerminkan belum optimalnya pengawasan dan penegakan regulasi.

7. Keterbatasan Sistem Informasi dan Early Warning Inflasi

Sistem pemantauan harga belum sepenuhnya terintegrasi dan prediktif, sehingga respons kebijakan cenderung bersifat reaktif.

8. Kerentanan terhadap Lonjakan Permintaan Musiman

Peningkatan permintaan pada periode hari besar keagamaan belum sepenuhnya diantisipasi dengan penguatan pasokan dan distribusi.

9. Keterbatasan Sarana Penyimpanan dan Pengolahan Pascapanen

Minimnya fasilitas penyimpanan (cold storage) dan pengolahan menyebabkan ketidakseimbangan harga antara musim panen dan paceklik.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi:

1. Kebijakan pada Aspek Ketersediaan Pasokan

a. Penguatan Produksi Lokal

- Mendorong peningkatan produksi komoditas strategis (cabai, bawang, dan pangan pokok).
- Pengembangan kawasan hortikultura berbasis potensi wilayah.
- Fasilitasi sarana produksi dan pendampingan petani.

b. Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

- Untuk menjamin kontinuitas pasokan terutama Bawang Merah dan Cabai Rawit akan dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam proses penandatanganan.

2. Kebijakan pada Aspek Keterjangkauan Harga

a. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM)

- Intervensi harga melalui operasi pasar pada periode tertentu, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

b. Stabilisasi Harga Komoditas Strategis

- Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
- Pengendalian harga komoditas seperti minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

3. Kebijakan pada Aspek Kelancaran Distribusi

a. Optimalisasi Infrastruktur Distribusi

- Pengoperasian dan optimalisasi Mini Distribution Center (MDC).

b. Pengendalian Biaya Logistik

- Fasilitasi distribusi ke wilayah kepulauan.

4. Kebijakan pada Aspek Komunikasi Efektif

a. Pemantauan dan Publikasi Harga

- Monitoring harga secara rutin di pasar tradisional dan modern.

b. Penguatan Koordinasi TPID

- Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait.

5. Pengawasan dan Penegakan Kebijakan

Pengawasan terhadap distribusi dan harga komoditas strategis di pasar.

- **Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi pengawas.**

6. Penguatan Sistem Informasi dan Early Warning

- **Integrasi data antar instansi terkait.**

7. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

- **Evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi TPID.**
- **Penguatan sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder.**

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kebijakan menjaga stok berhasil, tetapi belum mampu mengurangi risiko fluktuasi harga.
2. Intervensi harga bersifat reaktif dan belum konsisten, sehingga dampaknya belum merata.
3. Kebijakan distribusi belum efektif mengatasi disparitas harga antar wilayah.
4. Komunikasi sudah berjalan, namun belum mendukung early warning system secara optimal.
5. Koordinasi cukup baik di level perencanaan, namun perlu penguatan pada level implementasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi:

A. Penguatan Ketersediaan Pasokan

1. Peningkatan Produksi Lokal
 - Pengembangan kawasan sentra hortikultura (cabai dan bawang) berbasis potensi lokal.
 - Pemberian bantuan sarana produksi (benih, pupuk, irigasi sederhana).
 - Pendampingan petani untuk pola tanam berkelanjutan (off-season planting).
2. Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
 - Perluasan kerja sama pasokan dengan daerah produsen utama.
 - Penyusunan kontrak pasokan untuk menjaga stabilitas suplai dan harga.

B. Penguatan Stabilitas Harga

1. Intensifikasi Operasi Pasar dan GPM
 - Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin dan terjadwal.
 - Fokus pada komoditas volatile (cabai, bawang) dan wilayah dengan tekanan harga tinggi (kepulauan).
2. Pengendalian Harga Sesuai Kebijakan
 -

- Pengawasan ketat terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), khususnya minyak goreng.
- Penindakan terhadap pelanggaran distribusi dan penimbunan.

C. Perbaiki Sistem Distribusi

1. Optimalisasi Mini Distribution Center (MDC)

- Percepatan operasional MDC sebagai simpul distribusi pangan.
- Penetapan skema pengelolaan yang jelas (operator, pola distribusi, pembiayaan).

2. Penguatan Distribusi ke Wilayah Kepulauan

- Subsidi atau fasilitasi biaya transportasi logistik.
- Penjadwalan distribusi rutin untuk menjaga pasokan dan menekan harga.

D. Penguatan Sistem Informasi dan Early Warning

- Pengembangan sistem pemantauan harga berbasis digital dan real-time.
- Penyusunan dashboard inflasi daerah untuk analisis tren dan proyeksi.
- Pemanfaatan data untuk menentukan waktu intervensi

E. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi TPID

- Penegasan peran dan tanggung jawab masing-masing OPD dalam pengendalian inflasi.
- Pelaksanaan rapat TPID secara berkala dengan fokus pada aksi konkret.
- Monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.

F. Penguatan Infrastruktur Pangan dan Hilirisasi

- Pembangunan/pengadaan cold storage untuk komoditas hortikultura.
- Pengembangan pengolahan hasil (processing) untuk mengurangi fluktuasi harga saat panen raya.
- Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.

G. Pengendalian Permintaan dan Komunikasi Publik

- Kampanye diversifikasi konsumsi pangan.
- Edukasi masyarakat untuk belanja bijak (menghindari panic buying).
- Publikasi informasi harga secara transparan dan berkala.

H. Kebijakan Khusus Wilayah Kepulauan

- Penetapan wilayah kepulauan sebagai prioritas intervensi inflasi.
- Pelaksanaan GPM mobile (berbasis kapal/distribusi laut).
- Pengembangan lumbung pangan desa di wilayah terpencil.

◦